

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semenanjung Korea merupakan salah satu tempat di mana sisa-sisa konflik ideologis akibat Perang Dingin masih terus berlanjut, sehingga belum terjadi unifikasi. Ada berbagai tantangan untuk mencapai unifikasi di kawasan tersebut. Penyebab utama adalah kegiatan proliferasi nuklir di Korea Utara yang terjadi selama masa Perang Dingin. Ketegangan akibat proliferasi nuklir ini terutama mengalami eskalasi ketika Korea Utara keluar dari Non-Proliferation Treaty (NPT) saat dua fasilitas nuklirnya akan diinspeksi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) (C. Yang, 2016, h. 16). Hal ini menjadi pukulan fatal bagi intensi Presiden Kim Young-sam dari Korea Selatan dalam melakukan pendekatan lunak untuk mencapai unifikasi.

Untuk mengakhiri ketegangan antara kedua Korea, Presiden Kim Dae-jung yang menggantikan Kim Young-sam kemudian memperkenalkan Sunshine Policy pada tahun 1998. Kebijakan ini memiliki filosofi yang diambil dari fabel Aesop berjudul *The North Wind and The Sun*, yakni ketika Korea Utara menutup diri, Korea Selatan harus menjadi Sang Matahari yang mampu membuatnya membuka diri. Untuk itu, kebijakan ini memiliki tiga prinsip utama dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Tidak dibenarkan melakukan provokasi militer terhadap Korea Utara;
2. Korea Selatan tidak akan melakukan unifikasi dengan cara absorpsi;

3. Korea Selatan akan secara aktif melakukan kerja sama dan rekonsiliasi dengan Korea Utara.

Kebijakan ini memulai sejarah baru di Semenanjung Korea karena berhasil mempertemukan pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam Pertemuan Inter-Korea (Inter-Korea Summit) pada 14-16 Juni 2000 di Pyongyang. Sejumlah poin penting disepakati dalam pertemuan tersebut, seperti reuni keluarga yang terpisah akibat Perang Korea, pengurangan tensi militer, dan pelaksanaan kerja sama di berbagai bidang (Young, 2001, h. 60). Presiden Kim juga mulai memberikan berbagai bantuan lewat kesepakatan tersebut, baik kemanusiaan maupun ekonomi, dengan harapan Korea Utara dapat menghentikan kegiatan proliferasi nuklirnya. Keberhasilan Pertemuan Inter-Korea pertama membuat Presiden Kim dianugerahi Nobel Perdamaian di tahun yang sama (S. Yang, 2005, h. 246–247).

Namun, keberhasilan yang dicapai kebijakan ini bukan tanpa kritik. Sejumlah kritik datang dari kalangan konservatif karena Presiden Kim mengakomodasi kebijakan unifikasi Korea Utara yang bercita-cita mendirikan Republik Konfederasi Goryeo setelah unifikasi (C. Yang, 2016, h. 19). Selain itu, kebijakan ini dituding mengabaikan kekuatan internasional, terutama Amerika Serikat. Meski Sunshine Policy ada karena kerja sama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, hal tersebut berubah setelah Presiden George W. Bush berpidato mengecap Korea Utara sebagai bagian dari *axis of evil* (poros setan). Hal ini memberikan semacam jarak bagi penanganan isu Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Kritik tersebut mencapai puncaknya ketika Korea Utara sukses melakukan uji coba senjata nuklirnya pada Oktober 2006. Hal ini membuat sejumlah kalangan menganggap Sunshine Policy gagal mencapai tujuannya, yakni meredam ancaman nuklir Korea Utara. Meski Korea Utara menandatangani komitmen untuk menutup reaktor nuklir utamanya demi bantuan kemanusiaan, ketegangan akibat uji coba tersebut belum dapat diredakan. Pembicaraan-pembicaraan seputar denuklirisasi lewat Six Party Talks terus mengalami kegagalan karena Korea Utara menolak inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklirnya (CNN Library, 2019). Kegagalan pembicaraan ini membawa Korea Utara melakukan uji coba nuklir keduanya pada Mei 2009. Uji coba inilah yang mendorong pemimpin Korea Selatan saat itu, Presiden Lee Myung-bak, mengumumkan kegagalan Sunshine Policy dan secara resmi menghentikannya pada November 2009. Presiden Lee kemudian menggantinya dengan pendekatan yang lebih keras untuk menangani ancaman tersebut. Hal ini dapat dipahami karena uji coba senjata nuklir ini terindikasi sebagai ancaman kejahatan terhadap perdamaian, jika menggunakan definisi hukum internasional.

Sekitar delapan tahun kemudian, Sunshine Policy kembali menjadi sorotan setelah salah satu kandidat presiden pada kampanye 2017, Moon Jae-in, berjanji akan menghidupkan lagi kebijakan tersebut. Ketika akhirnya terpilih, Presiden Moon menepati janjinya tersebut dengan meluncurkan Sunshine Policy 2.0. Prinsip kebijakan ini masih sama dengan pendahulunya, di mana pendekatan lunak digunakan untuk menangani ancaman dari Korea Utara. Namun, untuk

membedakannya, kebijakan ini selanjutnya disebut dengan Moonshine Policy, yang diambil dari nama keluarga Presiden Moon.

Dalam 2 tahun pelaksanaannya, Moonshine Policy membawa perubahan bagi situasi yang sempat tegang di Semenanjung Korea akibat uji coba nuklir pada tahun 2017. Hal ini ditandai dengan Korea Utara yang kembali mengirimkan atletnya untuk berlaga di kompetisi olahraga tingkat regional dan internasional pada tahun 2018, yakni Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan Asian Games Jakarta-Palembang (Homewood, 2018). Korea Utara dan Selatan juga berjalan dalam satu bendera dalam upacara pembukaan. Pengiriman atlet ini kemudian dibalas oleh Korea Selatan dengan pengiriman artis-artis K-Pop untuk mengadakan konser di Pyongyang (C. Kim, 2018).

Lewat jalur-jalur non-politik, Korea Utara dan Selatan kemudian dapat mengarahkan hubungan mereka ke jalur-jalur politik. Hal ini dapat dilihat dari dikirimnya Kim Yo-jong, adik Kim Jong-un, untuk memimpin langsung delegasi atlet Korea Utara di Pyeongchang. Selama berada di Korea Selatan, Kim Yo-jong melakukan pertemuan dengan Presiden Moon dan menyerahkan catatan-catatan penting dari kakaknya di Korea Utara (Bicker, 2018). Selama pertemuan di Olimpiade Pyeongchang, terdapat indikasi keinginan dari Korea Utara untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Indikasi ini terbukti benar, karena Kim Jong-un mengundang Presiden Donald Trump untuk melakukan pembicaraan terkait denuklirisasi pada bulan Maret. Undangan tersebut diterima oleh Presiden Trump, yang kemudian memberikan *tweet* apresiasi kepada Kim

karena pembicaraan ini tidak hanya sekadar pembekuan fasilitas nuklir, tetapi mengarah kepada denuklirisasi (Boghani, 2019).

Pembicaraan politik ini mencapai puncak dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada 28 April 2018 oleh Presiden Moon dan Kim Jong-un. Dalam deklarasi ini, Korea Utara dan Korea Selatan berkomitmen untuk mengupayakan langkah-langkah damai dalam mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar bagi Pertemuan Trump-Kim di Singapura pada 12 Juni 2018 yang kembali menyepakati upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Meski belum sepenuhnya melaksanakan komitmen denuklirisasi, Korea Utara tetap menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut dan memberi sinyal penurunan ketegangan, baik kepada Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Pasca Pertemuan Trump-Kim di Singapura, Korea Utara mengurangi propaganda anti-Amerika di ibukotanya dan membatalkan apel peringatan anti-imperialisme Amerika yang selalu diperingati setiap tanggal 27 Juli (Ho et al., 2018). Korea Utara juga membongkar situs peluncuran roketnya di Desa Tonchang sebagai bentuk kepatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati (Seong, 2018).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Moonshine Policy melakukan perubahan yang melampaui kebijakan pendahulunya, yakni Sunshine Policy. Perubahan ini tidak saja menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea akibat uji coba nuklir yang terus meningkat sejak 2011, tetapi juga memicu terjadinya perbaikan bagi hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat. Hal-hal

inilah yang menyebabkan penelitian mengenai Moonshine Policy penting untuk dilakukan. Dengan penelitian tersebut, nantinya akan dapat diungkapkan perbedaan-perbedaan pola penerapan antara Moonshine Policy dibandingkan dengan pendahulunya, Sunshine Policy, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan perspektif Konfusianisme yang nanti akan dijelaskan dalam bagian kerangka pemikiran.

Dalam melihat masalah di Semenanjung Korea, terutama untuk melihat bagaimana Sunshine dan Moonshine Policy diterapkan, pendekatan-pendekatan rasional seperti realisme dan liberalisme belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang memuaskan. Sebab, jika melihat bagaimana Sunshine dan Moonshine Policy diterapkan, Korea Selatan sebenarnya lebih banyak mengeluarkan materi dan tenaga hanya untuk reunifikasi. Tentunya langkah-langkah ini tidak logis dan belum memuaskan jika dijelaskan menggunakan pendekatan ala Barat yang bersifat materialistis. Hal ini menunjukkan adanya motif lain yang bersifat non-material dan tentunya tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan rasional.

Meski benar bahwa Korea Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, rezim dinasti Kim membuat negara tersebut miskin secara ekonomi, sehingga Korea Selatan yang paling banyak mengeluarkan biaya untuk berinvestasi dan membangun fasilitas dalam rangka reunifikasi seperti investasi Kawasan Pariwisata Gunung Kumgang, Kawasan Industri Kaesong, rel kereta penghubung Semenanjung Korea, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya. Bahkan, ketika Sunshine Policy diterapkan, Korea Selatan mengorbankan

hubungannya dengan sekutu terkuatnya, Amerika Serikat, untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Dalam sudut pandang keamanan, ini pun bukan langkah yang praktis untuk dilakukan

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan Konfusianisme untuk melihat motif di balik pelaksanaan Sunshine dan Moonshine Policy. Pendekatan ini dipilih karena Sunshine dan Moonshine Policy dibuat dengan dasar filosofis Konfusianisme, bahwa jika Matahari memberi banyak kehangatan (kebaikan), maka Angin Utara yang dingin akan kalah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian tersebut adalah “Mengapa Moonshine Policy memiliki corak dan luaran yang berbeda dibanding kebijakan pendahulunya?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Mengetahui keterlibatan nilai budaya dalam pembuatan kebijakan luar negeri
2. Menjelaskan pengaruh budaya dalam pembuatan kebijakan luar negeri

### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan keberjalanan Moonshine Policy terhadap situasi di Semenanjung Korea
2. Menjelaskan budaya Konfusianisme di Semenanjung Korea
3. Menganalisis pengaruh budaya Konfusianisme terhadap keberjalanan Moonshine Policy
4. Menganalisis penyebab perbedaan pola dan luaran yang didapat Moonshine Policy dibanding Sunshine Policy dari perspektif Konfusianisme

### 1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari melakukan penelitian ini. Manfaat tersebut terbagi atas manfaat akademis dan manfaat praktis.

#### 1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berfokus kepada pengaruh budaya lokal, dalam hal ini Konfusianisme, terhadap keberjalanan Moonshine Policy, disertai dengan penjelasan perbedaan corak dan luaran jika dibandingkan Sunshine Policy sebagai kebijakan pendahulunya. Diharapkan penelitian ini akan membawa sumbangsih akademik melalui cara pandang baru untuk melihat keberjalanan suatu kebijakan luar negeri, yakni budaya, bagi ilmu hubungan internasional.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penulis berharap adanya kesadaran pemerintah untuk mengembangkan politik luar negeri dari nilai-nilai budaya, sehingga muncul ciri khas bagi suatu negara yang melakukannya.



### 1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian sebelumnya terkait topik Moonshine Policy ini belum ditemukan. Namun, terdapat penelitian yang memiliki relevansi cukup dekat dengan topik ini, yakni tulisan Hyun-key Kim Hogarth yang berjudul *South Korea's Sunshine Policy, Reciprocity and Nationhood*. Dalam tulisannya, Hogarth memaparkan bahwa kegagalan Sunshine Policy terjadi karena Korea Utara tidak memandang Korea Selatan dengan pendekatan yang sama, sehingga tidak terjadi timbal-balik yang diharapkan (Hogarth, 2012, h. 110). Untuk menjelaskannya, Hogarth menggunakan pendekatan *balance of reciprocity* yang dipaparkan oleh Marcel Mauss dan Marshall Sahlins.

Apa yang membedakan penelitian ini dengan Hogarth adalah penggunaan perspektif Konfusianisme sebagai alat analisis permasalahan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Konfusianisme, sebagai budaya yang telah lama berkembang di Semenanjung Korea, mempengaruhi penerapan Moonshine Policy. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus untuk mengupas permasalahan dari proses politik yang terjadi di Korea Selatan, sehingga pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah *top-down*.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Konfusianisme. Perspektif ini digunakan dengan pertimbangan bahwa Semenanjung Korea telah lama dipengaruhi oleh pemikiran tersebut sejak era Dinasti Goryeo, sehingga tradisi Konfusianisme mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sana, baik Korea Utara maupun Korea Selatan.

Untuk menjawab pertanyaan, “Apa itu Konfusianisme?”, ada berbagai kacamata yang bisa digunakan. Tulisan-tulisan William DeBary, Tu Weiming, dan Robert Neville mengkaji Konfusianisme sebagai suatu aliran filsafat (E. Y. J. Chung, 2015, h. 154). Beberapa sarjana juga mencoba mengkaji Konfusianisme sebagai agama dan sistem yang mempengaruhi berbagai bidang hidup di Asia Timur, mulai dalam lingkup keluarga, hubungan masyarakat, ekonomi, tradisi, budaya, hingga politik.

Namun, jika didefinisikan, sebenarnya Konfusianisme merupakan “jalan” pemikiran Konfusius (Kong Fuzi) untuk mencapai kesempurnaan (*sagehood*) sebagai manusia (E. Y. J. Chung, 2015, h. 24). Pertanyaan eksistensialnya cukup sederhana, “Apa yang membedakan manusia dengan binatang?” dan “Bagaimana seharusnya kita membuat hidup lebih berarti sebagai manusia?” (Tan, 1960, h. 96–97). Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, setidaknya ada dua inti yang sama-sama dimiliki penganut Konfusianisme di Asia Timur: proses pengembangan diri (*self-cultivation*) dan *ren* (仁 ; *benevolence, humanness, humanity*) (Huang, 2018, h. 78). Pemikiran-pemikiran yang menjadi inti Konfusianisme ini kemudian dicatat dalam teks Lima Klasik (*Five Classics*)<sup>1</sup> dan Empat Buku (*Four Books*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Lima Klasik (*Wu jing; Five Classics*) adalah teks kanon yang ditulis Konfusius selama masa hidupnya. Teks tersebut terdiri atas Buku Puisi (*Shijing; Book of Poetry*), Buku Sejarah (*Shujing; Book of History*), Buku Perubahan (*Yijing; Book of Changes*), Buku Ritual (*Liji; Book of Rites*), dan Catatan Musim Semi dan Musim Gugur (*Chunqiu; Spring and Autumn Annals*)

<sup>2</sup> Empat Buku (*Si shu; Four Books*) adalah berbagai teks yang disusun oleh filsuf Neo-Konfusianisme, Zhu Xi, pada masa Dinasti Song. Teks tersebut terdiri atas Analek Konfusius (*Lunyu; Confucian Analects*), Pelajaran-Pelajaran Agung (*Daxue; Great Learnings*), Jalan Tengah (*Zhongyong; Doctrine of The Mean*), dan Mensius (*Mengzi; Mencius*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat dua inti yang dimiliki sesama penganut Konfusianisme. Pertama, Konfusius percaya pentingnya proses pengembangan diri (*self-cultivation*) lewat moral dan etika untuk menjaga harmoni sosial. Dalam proses ini, seseorang mulai bersimpati secara terus-menerus, dimulai dari diri sendiri, kemudian, secara bertahap, kepada keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh dunia (Huang, 2018, h. 78). Keseluruhan proses ini dimulai dari unit terkecil yang paling penting dalam Konfusianisme, yakni keluarga. Sebab, menurut Konfusius, sikap bakti (*filial piety*) dan ritual (*rites*) yang dilakukan seorang anak kepada orangtua adalah dasar untuk memahami etika dalam keluarga dan masyarakat (E. Y. J. Chung, 2015, h. 26).

Dari proses pengembangan diri ini, kita kemudian dapat memahami paradigma klasik Lima Hubungan (*Wu lun; Five Relations*) yang menjadi dasar bagi masyarakat Konfusianisme. Kelima hubungan yang dimaksud adalah anak dan orangtua, suami dan istri, kakak dan adik, teman dan teman, serta pemerintah dan rakyat (Tan, 1960, h. 97). Kelima hubungan ini tidak semata-mata sesuatu yang bersifat biologis atau sosial, tetapi memiliki makna dan filosofis mendalam (E. Y. J. Chung, 2015, h. 27). Dijelaskan lebih lanjut bahwa, "...di antara orangtua dan anak terdapat kasih sayang; di antara pemerintah dan rakyat terdapat keadilan; di antara kakak dan adik terdapat rasa hormat; di antara suami dan istri terdapat pembedaan fungsi dan harmoni; di antara kakak dan adik terdapat ketertiban dan rasa hormat; serta di antara teman dan teman terdapat rasa percaya," (Mencius & Bloom, 2011, h. 54). Dari sini, dapat dikatakan bahwa

untuk memberi kebaikan kepada dunia, terlebih dahulu kita menjadi pasangan, orangtua, anak, dan teman yang baik bagi orang lain.

Inti kedua yang dipercaya oleh sesama penganut Konfusianisme adalah ajaran *ren* (仁; *benevolence, humanness, humanity*). Ajaran ini disebutkan dalam Analek Konfusius sebanyak 105 kali (Huang, 2018, h. 78). *Ren* memiliki banyak arti dalam Konfusianisme, seperti cinta kasih kepada sesama, kepedulian, kebijaksanaan, serta kemanusiaan (Confucius, 2003, h. 30, 136). Semua definisi itu terangkum dalam satu pepatah terkenal, “Jangan lakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu,” (E. Y. J. Chung, 2015, h. 24; Confucius, 2003, h. 34, 126). Konfusianisme percaya bahwa kunci mempertahankan harmoni sosial adalah *ren*. Sebab, dengan memiliki *ren*, maka seseorang dapat membedakan benar dan salah, serta meluruskan apa yang salah (Confucius, 2003, h. 136). Oleh karena itu, pemikiran ini sangat menekankan pentingnya ritual-ritual tradisional. Sebab, dengan ritual tersebut, seseorang dapat belajar beretika dan menempatkan dirinya dalam masyarakat (Confucius, 2003, h. 125).

Dalam penerapannya lebih jauh, negara merupakan salah satu bagian dalam Lima Hubungan yang sakral menurut Konfusianisme. Pemerintah adalah kunci untuk mempertahankan negara itu sendiri. Jika pemerintah baik, maka dia akan dipatuhi dan didengarkan (Confucius, 2003, h. 132), sehingga negara dapat bertahan karena adanya kepercayaan rakyat (Confucius, 2003, h. 128). Karena pemerintah adalah contoh bagi rakyat, maka para elit harus memberikan contoh yang baik (Confucius, 2003, h. 133), serta melaksanakan tugasnya tanpa lelah dan penuh tanggung jawab (Confucius, 2003, h. 132). Sebab, kunci dari suksesnya

sebuah sistem politik adalah proses pengembangan diri (*self-cultivation*) para elitnya.

Dari paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan negara bukanlah *power*, tetapi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Konfusianisme menekankan bahwa etika dan moral lebih penting bagi negara dibandingkan sesuatu yang bersifat material seperti kekuatan militer (Mencius & Bloom, 2011, h. 127–128). Lebih lanjut, Tu Weiming mengatakan, “Energi vital yang melekat dalam hubungan antarmanusia memberikan jalan untuk mentransformasi masyarakat dan mendirikan suatu struktur politik tertentu. Oleh karena itu, fokus dominan Konfusianisme dalam ideologi politik adalah etika, bukan *power*,” (E. Y. J. Chung, 2015, h. 84). Negara-negara yang sistem politiknya dipengaruhi Konfusianisme, termasuk Korea Utara dan Korea Selatan, melihat eksistensinya sebagai sebuah mekanisme untuk menjaga ketertiban moral.

Jika Konfusianisme diterapkan dalam dunia internasional, interaksi negara tak ubahnya seperti hubungan antarindividu. Untuk membaaur dengan perubahan global, terutama dalam ideologi politik dan ekonomi, negara mengadaptasi “etika dan moral” internasional untuk dapat diterima. Dalam kasus Korea Selatan dan Korea Utara, ideologi Barat yang diadaptasi membaaur bersama dengan nilai Konfusianisme, sehingga penerapannya juga berbeda. Bagi Korea Utara yang menganut komunisme, adanya Konfusianisme menyebabkan lahirnya ideologi *Juche* yang menekankan kepatuhan tinggi terhadap negara. Sementara Korea Selatan, meski mengadaptasi demokrasi liberal, nilai-nilai Konfusianisme ada dalam bentuk otoritarianisme dan politik moral (Oknim, 2000, h. 106).

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Perspektif Konfusianisme yang dijelaskan dalam kerangka pemikiran akan lebih lanjut dijabarkan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut. Terdapat dua definisi untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, yakni konseptual dan operasional.

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil definisi konseptual Konfusianisme sebagai budaya dalam politik Korea Utara dan Korea Selatan. Konfusianisme adalah budaya yang mengakar ratusan tahun di Korea dan menciptakan susunan masyarakat yang mengedepankan harmoni sosial, serta pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menjaga hal tersebut.

### **1.6.2. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, dimensi dalam Konfusianisme yang akan diteliti adalah politik luar negeri. Indikator dari penerapan Konfusianisme dalam politik luar negeri ini ada dua, yakni negara mengedepankan etika dan moral dalam interaksinya, serta bertujuan untuk menjaga harmoni sosial di kawasan, yakni Semenanjung Korea.

## **1.7. Argumen Penelitian**

Argumen utama dalam penelitian ini adalah budaya Konfusianisme memberi pengaruh terhadap pelaksanaan Moonshine Policy di Semenanjung Korea, terutama dalam cara pandang baru Korea Selatan terhadap Korea Utara.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Definisi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi yang dipaparkan oleh Denzin dan Lincoln. Definisi tersebut sekaligus memaparkan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni mencapai pemahaman mendalam mengenai suatu organisasi atau peristiwa (Herdiansyah, 2010, h. 7).

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini tidak hanya sekedar berhenti dalam penggambaran umum suatu fenomena, tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan apa pengaruhnya.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua jenis jangkauan, yakni ruang dan waktu. Ruang penelitian ini hanya akan berfokus di Semenanjung Korea. Sementara ruang waktu penelitian ini berfokus kepada masa penerapan Moonshine Policy, yakni pada tahun 2017-2019.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek yang menjadi penelitian adalah pemerintah Korea Selatan, dalam hal ini pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in, ketika menerapkan Sunshine Policy dan Moonshine Policy.

#### 1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks-teks, frasa, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in dalam melaksanakan Sunshine dan Moonshine Policy.

#### 1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan rekaman pidato yang dilakukan oleh Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in dalam melaksanakan Sunshine dan Moonshine Policy. Sementara data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dari dokumen-dokumen yang terkait dengan Sunshine dan Moonshine Policy.

#### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Herdiansyah, 2010, h. 143). Dokumen yang akan digunakan adalah artikel ilmiah, buku, informasi-informasi dari *website* Kementerian Unifikasi Korea, serta berita dari berbagai media internasional resmi yang berkaitan dengan penelitian.